

**PENGARUH KINERKA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN
TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

Lusiana, Nugraheni Rintasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email : lushyanalushy@gmail.com

nugraheni.rintasari@act.uad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional financial performance on economic growth, poverty levels, and education levels in Gunungkidul district in 2010-2017. The population and sample in this study were Gunungkidul Regency with a saturated sampling technique. The data collection technique is documentation. The data used are the Budget Realization Report, the GRDP growth rate, the percentage of poor people and the percentage of average school years. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of the study are simultaneously and partially the independence ratio, the ratio of the effectiveness of PAD, the ratio of expenditure, and the ratio of income growth does not affect economic growth. Then simultaneously the independence ratio, the ratio of the effectiveness of PAD, the ratio of expenditure, and the ratio of income growth does not affect the level of poverty. But partially the independence ratio affects the poverty level, while the ratio of the effectiveness of the PAD, the ratio of spending, and the ratio of income growth does not affect the level of poverty. Furthermore, simultaneously the independence ratio, the ratio of the effectiveness of PAD, the ratio of expenditure, and the ratio of income growth did not affect the level of education. But partially the independence ratio affects the level of education, while the ratio of the effectiveness of PAD, the ratio of spending, and the ratio of income growth does not affect the level of education.

Keywords : *financial performance, economic growth, poverty, education*

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah diterapkan dalam rangka memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri. Menurut Rahmawati dan Putra (2016) kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2012 dilihat dari tingkat kemandirian keuangannya masih tergolong rendah sekali. Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2012 sebesar 7,75%. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat masih memiliki peranan yang sangat besar untuk Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan perekonomiannya. Oleh karena itu Kabupaten Sumbawa belum mampu menerapkan kebijakan otonomi daerahnya secara finansial karena kemampuan dalam membiayai program perekonomian masih tergolong rendah sekali.

Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pencapaian hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan indikator keuangan. Penilaian atas

pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Astuti, 2015). Pemerintah daerah harus melakukan penilain kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio kemandirian keuangan daerah bermanfaat untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan akan menurun. Rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja bermanfaat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD serta

untuk mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penghematan anggaran. Semakin tinggi realisasi penerimaan PAD dengan tingkat biaya yang rendah maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat mengefektifkan berbagai program untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah dalam tahun anggaran yang bersangkutan kinerja keuangan pemerintah mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif. Hal ini berarti apabila pertumbuhan pendapatan positif dan meningkat, maka akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat mendorong pengalokasian belanja modal untuk berbagai program mengatasi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat kemiskinan tidak lepas dari pendidikan. Menurut Permatasari dan Dwirandra (2016) pendidikan memberikan kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat lepas dari kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra (2014) menunjukkan bahwa kinerja

keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin besar sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah maka semakin menurun tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah kecil dibandingkan dengan target. Pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan pendapatan lebih besar dari target. Penerimaan pendapatan dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi sehingga kurang mampu dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu Permatasari dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian, kinerja keuangan berupa rasio efisiensi dan rasio efektivitas tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya untuk kinerja keuangan berupa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Simatupang dan Dermoredjo (2003) strategi yang dilakukan dalam menurunkan tingkat kemiskinan harus dilakukan secara efektif. Sehingga salah satu faktor yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi adalah

efektivitas dalam penurunan tingkat kemiskinan yang ada.

Kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok minimum dan sejumlah penduduk tersebut hidup dibawah tingkat kebutuhan minimum (Paramita dan Purbadharmaja, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Garis kemiskinan merupakan gambaran dari nilai kebutuhan pokok minimum.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan (Kuncoro, 2006). Penyebab kemiskinan salah satunya adalah sumber daya manusia yang rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan artinya semakin banyak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk lepas dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Widyastuti (2012) menyatakan bahwa produktivitas pekerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Meningkatnya produktivitas secara langsung memberikan dampak pada standar hidup melalui pendapatan.

Selain tingkat kemiskinan, kinerja keuangan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ani dan

Dwirandra (2014) menunjukkan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Suryawati (2005) menjelaskan tentang tingkat pendidikan dengan kemiskinan, dimana keduanya saling berpengaruh dan saling berkaitan. Menurut Permatasari dan Dwirandra (2016) kaitanya kemiskinan dengan pendidikan adalah pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk lepas dari kemiskinan menuju kesejahteraan rakyat dengan penguasaan ilmu dan keterampilan.

Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi penelitian dari Ani dan Dwirandra (2014). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terdapat variabel lain dalam penelitian ini yaitu variabel pendidikan. Perbedaan lainnya adalah studi penelitian, untuk penelitian ini studi penelitiannya di Kabupaten Gunungkidul sedangkan untuk penelitian sebelumnya di Provinsi Bali.

Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul masih tinggi dengan jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 135.74 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2019). Namun sebenarnya Kabupaten Gunungkidul kaya akan beragam potensi yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km^2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memiliki beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata yang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul menduduki urutan empat terendah.

Berdasarkan tabel Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2015-2017, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebanyak 155.00 (ribu orang), pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 139.15 (ribu orang), dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 135.74 (ribu orang).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya,

tetapi jika dibandingkan dengan lima kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tergolong paling rendah.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul masih rendah, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi. Selain itu juga disebabkan karena minat masyarakat Gunungkidul untuk melanjutkan jenjang pendidikan masih rendah. Masyarakat Gunungkidul memilih untuk terjun ke dunia kerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK pada tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2016 minat masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA/SMK rendah.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka munculah rumusan dalam penelitian ini yaitu Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul?

1. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Manfaat lainnya digunakan sebagai bahan referensi, informasi, dan literatur tentang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan.

- a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, pada Pasal 1 Ayat (37) pengertian kinerja adalah keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (6) pengertian dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

- b. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari hasil analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dibuat (Astuti, 2015). Hasil pengukuran kinerja keuangan daerah tersebut dapat digunakan untuk melihat tingkat hasil dari pelaksanaan program-program atau kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah serta untuk memperbaiki kualitas kinerja keuangan di tahun mendatang (Ali dan Maisyuri, 2017). Manfaat dari pengukuran kinerja pemerintah menurut Mardiasmo (2009:122) adalah:

- 1) Paham akan ukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah.

- 2) Sebagai acuan dalam keberhasilan kinerja yang telah dibuat oleh pemerintah.
- 3) Sebagai pengawasan untuk mengevaluasi kinerja yang telah tercapai dengan membandingkan dengan target kinerja yang telah direncanakan.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapai.
- 5) Untuk alat komunikasi antar anggota pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dari masing-masing anggota.
- 6) Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 7) Mengetahui program dan kegiatan pemerintah.
- 8) Pengambilan keputusan pemerintah dilakukan secara objektif.

Pengukuran kinerja tersebut dapat menggunakan beberapa teknik analisis, diantaranya yang paling sering digunakan adalah dengan analisis rasio keuangan. Beberapa diantara analisis rasio keuangan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, dan analisis pertumbuhan pendapatan.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri program kegiatan

dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut (Mahmudi, 2016:140).

Rumus rasio kemandirian daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil dari program kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016:141) rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi dan atau merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan potensi riil yang ada di daerah.

Rumus rasio efektivitas pendapatan asli daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kategori Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

3) Rasio Efisiensi Belanja.

Efisiensi adalah tingkat pencapaian hasil program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan suatu anggaran (Mahmudi, 2016 : 164).

Rumus rasio efisiensi belanja

$$\frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja dapat dinilai efisien apabila nilai rasio efisiensi kurang dari 100%. Apabila nilai yang dihasilkan lebih dari 100% maka telah terjadi pemborosan anggaran atau tidak efisien.

4) Analisis Pertumbuhan Pendapatan.

Analisis dari pertumbuhan pendapatan ini bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Rumus pertumbuhan pendapatan

$$\frac{\text{Pendapatan } Th_t - \text{Pendapatan } Th_{(t-1)}}{\text{Pendapatan } Th_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Pertumbuhan Ekonomi.

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat terwujud melalui desentralisasi fiskal dengan tercapainya otonomi daerah yang termuat dalam teori *fiscal federalism* (Ani dan Dwirandra, 2014). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan untuk meningkatkan

perekonomian dengan cara peningkatan produksi barang dan jasa. Perekonomian tumbuh apabila tingkat output perkapita naik dan balas jasa riil terhadap faktor-faktor produksi yang digunakan meningkat dari tahun sebelumnya (Dewi dan Sriwardani, 2017).

Selain meningkatkan produksi barang dan jasa terdapat indikator lain yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator tersebut adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto ini dijadikan sebagai sektor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yuliana (2014) menyatakan Produk Domestik Regional Bruto ini digunakan untuk mengukur jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi.

b. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi salah satunya dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto ini tidak lepas dari potensi atau kekayaan dan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing.

Kemiskinan.

a. Pengertian Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan sehari-hari yang layak. Paramita dan Purbadharmaja (2015) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan seseorang atau kelompok yang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidup yang minimum.

b. Pengukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan konsep tersebut pengukuran tingkat kemiskinan terdiri dari tiga indikator yaitu:

1) Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yaitu total persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Ukuran ini menunjukkan perbedaan atau selisih antara pendapatan rata-rata dari penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin tinggi juga tingkat kesenjangannya dengan garis kemiskinan. Namun sebaliknya, apabila nilai indeks kedalaman kemiskinan rendah maka tingkat kesenjangan terhadap garis kemiskinan rendah, sehingga penduduk miskin sudah mulai mendekati garis kemiskinan dan sudah mengalami kenaikan dalam memenuhi kebutuhan.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan adalah suatu gambaran tentang penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Apabila nilai indeks ini tinggi, maka tingkat ketimpangan penyebaran antar penduduk miskin juga akan tinggi. Sebaliknya, apabila nilai indeks ini rendah, maka tingkat ketimpangan penyebaran antar penduduk miskin rendah.

Kemiskinan juga dapat diukur dengan tingkat konsumsi penduduk yaitu total uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dalam satu bulan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah total penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Pendidikan.

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan dalam kaitannya pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (4) terdapat enam prinsip penyelenggaraan pendidikan. Beberapa diantaranya adalah:

- 1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Sehingga dalam kaitannya dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan

pemberdayaan dan mengembangkan kreativitas terhadap potensi yang ada.

Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyandari dan Badera (2018) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan indeks pembangunan manusia. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kinerja keuangan dan variabel pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Dwirandra (2016) tentang Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Rasio efisiensi, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi

kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra (2014) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kinerja keuangan dari rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Kemudian kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan. Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Astuti (2015) tentang Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007 hingga 2011) Hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Hamid (2018) tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka- Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan perkapita. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berupa angka usia harapan hidup. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berupa rata-rata lama sekolah.

Penelitian yang dilakukan Hafidh (2011) tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian sangat rendah, rasio efisiensi kurang baik dan rasio

efektivitas menunjukkan nilai yang cukup efektif.

Pengembangan Hipotesis.

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki dampak yang besar terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan perekonomian dengan meningkatnya produksi barang dan jasa. Hal ini dapat digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga tercapainya target pemerintah daerah yaitu kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah dalam membiayai kegiatan perekonomiannya. Apabila tingkat kemandirian suatu daerah tinggi maka daerah tersebut telah mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang tinggi ini disebabkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada jumlah pendapatan transfer. Oleh karena itu, kurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut berkembang dengan baik. Ani & Dwirandra (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_1 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

2. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai yang ditargetkan. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap anggaran PAD maka kinerjanya semakin efektif. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan dan dimiliki oleh suatu daerah harus dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini tidak hanya dilihat dari hasil pendapatannya, akan tetapi dilihat juga dari cara daerah mengelola pendapatan tersebut. Apabila tingkat pengelolaan pendapatan serta kualitas pelayanan daerah baik maka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah yang dihasilkan juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa daerah telah mengoptimalkan kemampuan

daerah dalam memperoleh pendapatan. Astuti (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_2 : Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

3. Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat penghematan anggaran belanja dengan cara membandingkan belanja yang dianggarkan dengan belanja yang terealisasi. Belanja daerah dikeluarkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara produksi barang dan jasa. Meningkatnya produksi barang dan jasa ini akan berdampak pada peningkatan belanja. Belanja daerah yang meningkat ini juga harus mampu meningkatkan perekonomian di masyarakat agar berkembang dengan baik. Apabila perekonomian berkembang, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hafidh (2011) menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat efisiensinya maka semakin tinggi pula belanja daerah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

H_3 : Rasio efisiensi belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan disebabkan karena pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat. Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

H_4 : Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

5. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan perekonomiannya. Pemerintah daerah dalam kinerjanya harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah juga harus mempertahankan pertumbuhan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka diharapkan tingkat

kemiskinan semakin rendah. Pertumbuhan ekonomi tersebut digunakan untuk membuat program atau kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain itu, dengan pendapatan asli daerah yang tinggi dapat digunakan untuk menambah asset yang dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan menurun. Astuti (2015) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah digunakan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat memberikan dampak positif yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Ani & Dwirandra (2014) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

H₅: Rasio kemandirian keuangan daerah, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

6. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Rasio efektivitas menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan dengan potensi riil yang ada. Semakin besar realisasi PAD dibandingkan dengan target yang dianggarkan, maka kinerja dikatakan efektif. Pendapatan yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apabila kualitas

pelayanan publik meningkat maka kesejahteraan meningkat dan tingkat kemiskinan menurun. Permatasari dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa pendapatan meningkat dapat digunakan untuk penambahan asset yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga kemiskinan menurun.

H₆: Rasio efektivitas PAD, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

7. Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat penghematan anggaran belanja dengan cara membandingkan belanja yang dianggarkan dengan belanja yang terealisasi. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peningkatan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Belanja daerah yang meningkat ini juga harus mampu meningkatkan perekonomian di masyarakat secara merata agar berkembang dengan baik. Berkembangnya perekonomian ini ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka tingkat kemiskinan akan menurun. Permatasari dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa pengelolaan belanja secara efektif akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan.

H₇: Rasio efisiensi belanja, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

8. Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan maka artinya pertumbuhan pendapatannya dari tahun ketahun menunjukkan hasil yang positif. Apabila rasio pertumbuhan pendapatan meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Permatasari dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan maka dapat digunakan untuk meningkatkan program-program untuk menurunkan tingkat kemiskinan

H₈: Rasio pertumbuhan pendapatan, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

9. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pendidikan

Pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pendapatan tinggi apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sumber daya yang berkualitas ini akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Kualitas sumber daya manusia juga tidak lepas

dari tingkat pendidikan. Pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penguasaan ilmu dan keterampilan. Peningkatan pendapatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kembali program-program pendidikan. Sehingga apabila pendapatan meningkat maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan berkurang. Dwirandra dan Permatasari (2016) menyatakan bahwa pendapatan meningkat ditandai dengan meningkatnya produktivitas yang tidak lepas dari peran pendidikan. Hamid (2018) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berupa rata-rata lama sekolah.

H₉: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

10. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Pendidikan

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai yang ditargetkan. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap anggaran PAD maka kinerjanya semakin efektif. Pendapatan asli daerah tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan. Sehingga dengan sumber

daya manusia yang berkualitas maka akan memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kembali pendapatan asli daerah. Hamid (2018) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berupa rata-rata lama sekolah.

H₁₀: Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

11. Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Tingkat Pendidikan

Rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat penghematan anggaran belanja dengan cara membandingkan belanja yang dianggarkan dengan belanja yang terealisasi. Penghematan anggaran belanja ini tidak lepas dari tata cara pengelolaannya. Pengelolaan anggaran belanja yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga anggaran belanja dapat dialokasikan dengan tepat untuk program-program pendidikan. Hamid (2018) menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berupa rata-rata lama sekolah.

H₁₁: Rasio efisiensi belanja berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

12. Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Terhadap Tingkat Pendidikan

Rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui apakah

kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan maka artinya pertumbuhannya dari tahun ketahun menunjukkan hasil yang positif. Apabila rasio pertumbuhan pendapatan meningkat maka sumber daya manusia yang dimiliki daerah juga berkualitas. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan di suatu daerah tersebut meningkat. Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan maka artinya tingkat pendidikan mengalami peningkatan.

H₁₂: Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini dari salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2017.

Teknik Pengambilan Sampel. Teknik pengambilan sampel adalah *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan populasi sebagai sampel (Ani dan Dwirandra, 2014).

Teknik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data keuangan realisasi APBD, laju pertumbuhan PDRB, persentase penduduk miskin, dan persentase rata-rata lama sekolah. Sumber data diperoleh dari dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Badan Pusat Statistik, serta situs Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi.

Pengukuran Variabel.

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan atau program-program pemerintah daerah yang telah dicapai yang diukur dengan penilaian keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periode tersebut. Penilaian keuangan diukur dengan rasio keuangan antara lain :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri program kegiatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Skala pengukurannya menggunakan rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target dengan potensi riil (Mahmudi, 2007:129). Skala pengukurannya menggunakan rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pemerintah daerah dikatakan efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah apabila hasil rasio ini mencapai 100% atau lebih dari 100%.

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran (Mahmudi, 2016 : 164). Skala pengukurannya menggunakan rasio dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja dapat dinilai efisien apabila nilai rasio efisiensi kurang dari 100%.

d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan ini digunakan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Skala pengukurannya menggunakan rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan } Th_t - \text{Pendapatan } Th_{(t-1)}}{\text{Pendapatan } Th_{(t-1)}} \times 100 \%$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan persentase laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2010-2017.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidup yang minimum untuk kelangsungan hidup mereka. Variabel kemiskinan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2017.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Variabel pendidikan dalam penelitian ini menggunakan data rata-rata lama

sekolah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2017.

Analisis Data.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen atau lebih (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 157). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini:

a. Model regresi linier berganda untuk hipotesis pertama

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + et$$

Keterangan:

Y= pertumbuhan ekonomi

a= nilai konstanta/parameter *intercept*

X_1 = rasio kemandirian keuangan daerah

X_2 = rasio efektivitas pendapatan asli daerah

X_3 = rasio efisiensi

X_4 = rasio pertumbuhan pendapatan

$b_1b_2b_3b_4$ = nilai koefisien regresi/ parameter koefisien regresi variabel independen.

et= faktor pengganggu

b. Model regresi linier berganda untuk hipotesis kedua

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + et$$

Keterangan:

Y= tingkat kemiskinan

a= nilai konstanta/parameter *intercept*

X_1 = rasio kemandirian keuangan daerah

X_2 = rasio efektivitas pendapatan asli daerah

X_3 = rasio efisiensi

X_4 = rasio pertumbuhan pendapatan

$b_1b_2b_3b_4$ = nilai koefisien regresi/parameter koefisien regresi variabel independen.

et = faktor pengganggu

c. Model regresi linier berganda untuk hipotesis ketiga

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + et$$

Keterangan:

Y = tingkat pendidikan

a = nilai konstanta/parameter *intercept*

X_1 = rasio kemandirian keuangan daerah

X_2 = rasio efektivitas pendapatan asli daerah

X_3 = rasio efisiensi

X_4 = rasio pertumbuhan pendapatan

$b_1b_2b_3b_4$ = nilai koefisien regresi/parameter koefisien regresi variabel independen.

et = faktor pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual (PE)	Unstandardized Residual (TK)	Unstandardized Residual (TP)
N		8	8	8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7	0E-7	0E-7
	Std. Deviation	.36040782	.50261508	.14715140
Most Extreme Differences	Absolute	.221	.245	.211
	Positive	.187	.245	.211
	Negative	-.221	-.134	-.167
Kolmogorov-Smirnov Z		.626	.693	.598
Asymp. Sig. (2-tailed)		.828	.723	.868

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel uji normalitas data diatas menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikasi variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,823. Nilai signifikasi variabel tingkat kemiskinan adalah 0,723. Sedangkan untuk variabel tingkat pendidikan nilai signifikasinya adalah 0,868. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5% artinya data tersebut berdistribusi normal atau memenuhi persyaratan uji normalitas.

Uji Autokorelasi.

Runs Test

	Unstandardized Residual (PE)	Unstandardized Residual (TK)	Unstandardized Residual (TP)
Test Value ^a	.01303	-.11848	-.00799
Cases < Test Value	4	4	4
Cases >= Test Value	4	4	4
Total Cases	8	8	8
Number of Runs	5	5	5
Z	.000	.000	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	1.000

a. Median

Sumber : Output SPSS 20 (2019)

Hasil uji autokorelasi di atas menggunakan uji *Runs Test* yang menunjukkan nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan adalah 1,000. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga data tersebut tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Multikolinieritas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.057	8.054		-.007	.995		
RASIO_KEMANDIRIAN	.059	.056	.623	1.059	.367	.627	1.594
RASIO_EFETIVITAS_PAD	-.005	.034	-.092	-.161	.882	.669	1.496
RASIO_EFISIENSI_BELANJA	.047	.079	.327	.601	.590	.732	1.367
RASIO_PERTUMBUHAN_PENDAPATAN	.033	.060	.375	.550	.621	.466	2.147

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Tabel uji multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua variabel independen lebih besar dari 10% atau 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk seluruh variabel independen kurang dari 10. Hal ini berarti data tersebut tidak ada gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.833	3.472		.816	.474
	RASIO_KEMANDIRIAN	-.033	.024	-.612	-1.373	.263
	RASIO_EFEKTIVITAS_PAD	-.013	.015	-.390	-.903	.433
	RASIO_EFISIENSI_BELANJA	-.008	.034	-.097	-.235	.830
	RASIO_PERTUMBUHAN_PENDAPATAN	-.007	.026	-.135	-.262	.811

a. Dependent Variable: ABS_RES_PE
Sumber : Output SPSS 20 (2019)

Uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen terhadap *absolute residual* variabel dependen pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan model *logistic regression* dengan metode enter pada tingkat signifikan (α) 5%.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Sig. 1-tailed
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.057	8.054		-.007	.995	
	RASIO_KEMANDIRIAN	.059	.056	.623	1.059	.367	.183
	RASIO_EFEKTIVITAS_PAD	-.005	.034	-.092	-.161	.882	.441
	RASIO_EFISIENSI_BELANJA	.047	.079	.327	.601	.590	.295
	RASIO_PERTUMBUHAN_PENDAPATAN	.033	.060	.375	.550	.621	.310

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
Sumber : Output SPSS 20 (2019)

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah nilai signifikasinya sebesar $0,183 > 0,05$ yang artinya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti walaupun setiap tahunnya PAD Kabupaten Gunungkidul meningkat namun tingkat pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi dan dana pinjaman juga tinggi. Sehingga pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mampu membiayai sendiri program kegiatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Risyanto (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Rasio efektivitas PAD nilai signifikasinya sebesar $0,441 > 0,05$

yang artinya rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai target penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan masih belum dilakukan secara maksimal. Sehingga potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah belum diolah dan dikembangkan dengan baik. Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- c. Variabel rasio efisiensi belanja nilai signifikasinya sebesar $0,295 > 0,05$ yang artinya rasio efisiensi belanja tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penghematan agar tidak terjadi pemborosan anggaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penghematan anggaran yang dilakukan ini mengurangi belanja untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang memperoleh manfaat yang maksimal dari pengalokasian belanja untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya perkembangan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa rasio

efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- d. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan nilai signifikasinya sebesar $0,310 > 0,05$ yang artinya rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul belum maksimal, sehingga belum cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi belum berkembang dengan baik. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Sig. 1-tailed
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	25.272	11.232		2.250	.110	
	RASIO_KEMANDIRIAN	-.276	.078	-.827	-3.518	.039	.018
	RASIO_EFECTIVITAS_PAD	.044	.047	.210	.922	.424	.212
	RASIO_EFISIENSI_BELANJA	-.071	.110	-.141	-.648	.563	.281
	RASIO_PERTUMBUHAN_PENDAPATAN	.045	.083	.149	.544	.624	.312

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN
 Sumber : Output SPSS 20 (2019)

a. Variabel rasio kemandirian keuangan daerah nilai signifikasinya sebesar $0,018 < 0,05$ yang artinya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap negatif tingkat kemiskinan. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki telah dikembangkan dengan baik dan maksimal. Pengembangan potensi ini juga akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Hal ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikutsertakan peran masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada. Sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lepas dari tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) juga menunjukkan bahwa rasio

kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

b. Variabel rasio efektivitas PAD nilai signifikasinya sebesar $0,212 > 0,05$ yang artinya rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap negatif tingkat kemiskinan. Tingkat PAD yang dihasilkan belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Sehingga program kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) juga menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

c. Variabel rasio efisiensi belanja nilai signifikasinya sebesar $0,281 > 0,05$ yang artinya rasio efisiensi belanja tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat belanja daerah yang terealisasi melebihi belanja daerah yang dianggarkan. Kemudian tingkat pendapatan yang seharusnya diterima tidak sepadan dengan belanja yang dikeluarkan. Hal ini berarti belanja tersebut tidak digunakan untuk belanja program-program dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) juga menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

d. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan nilai signifikasinya sebesar $0,312 > 0,05$ yang artinya rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Gunungkidul masih relatif rendah. Sehingga untuk membiayai program-program dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan belum optimal. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) juga menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

positif terhadap tingkat pendidikan. Artinya bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan PAD Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan penerimaan PAD ini tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah ini digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sehingga apabila tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia meningkat maka akan meningkatkan pendapatan PAD. Hamid (2018) menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berupa rata-rata lama sekolah.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.	Sig. 1-tailed
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.383	3.289		1.637	.200	
	RASIO_KEMANDIRIAN	.098	.023	.989	4.255	.024	.012
	RASIO_EFECTIVITAS_PAD	-.010	.014	-.157	-.699	.535	.267
	RASIO_EFISIENSI_BELANJA	.009	.032	.061	.284	.795	.397
	RASIO_PERTUMBUHAN_PENDAPATAN	.006	.024	.063	.232	.832	.416

a. Dependent Variable: TINGKAT_PENDIDIKAN
Sumber : Output SPSS 20 (2019)

a. Variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar $0,012 < 0,05$ yang artinya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh

b. Variabel rasio efektivitas PAD sebesar $0,267 > 0,05$ yang artinya rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. Artinya realisasi pendapatan PAD pada Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal dari yang ditargetkan. Sehingga pendapatan tersebut belum cukup untuk menjalankan program-program pendidikan. Harliyani dan Haryadi (2016) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pendidikan.

c. Variabel rasio efisiensi belanja sebesar $0,397 > 0,05$ yang artinya rasio efisiensi belanja tidak berpengaruh positif terhadap tingkat

pendidikan. Artinya Kabupaten Gunungkidul telah melakukan efisiensi anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Hal ini mengakibatkan belanja atau pengeluaran untuk program-program yang berkaitan dengan pendidikan terbatas. Sehingga pelaksanaan program-program pendidikan kurang optimal. Harliyani dan Haryadi (2016) menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pendidikan.

- d. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan sebesar $0,416 > 0,05$ yang artinya rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. Pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Gunungkidul masih relatif rendah. Sehingga untuk membiayai program-program dalam rangka meningkatkan program-program pendidikan belum optimal. Harliyani dan Haryadi (2016) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara parsial rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian secara parsial rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat pendidikan. Kemudian secara parsial rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, sedangkan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi

belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pendidikan.

Keterbatasan.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gunungkidul tidak diberikan dalam bentuk softfile atau hardfile.

Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah dan dinas terkait agar lebih memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pendidikan. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangannya sudah cukup baik namun belum ada kontribusinya terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat miskin sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan pemerintah melakukan distribusi pendapatan kepada masyarakat miskin.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian dan menambah variabel rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga

dapat menambah sampel yang digunakan atau objek penelitian. Sebagai contoh objek penelitian di 5 kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar kabupaten di Provinsi DIY.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Maisyuri. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(1), 41–56.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 481–497.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1 Juli 2015), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

- Dewi, R. S., & Sriwardani. (2017). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 72–83.
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1741–1770.
- Hafidh, A. A. (2011). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Penelitian Humaniora*, 18(2), 109–120.
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pngaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka- Jawa Barat. *SEKURITAS(Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 38–51.
- Harliyani, E. M., & Haryadi. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. : Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lupiyoadi, Rambat & Ikhsan, Ridho Bramulya. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Paramita, A. A. I. D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(10), 1194–1218.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Permatasari, N. K. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Akuntansi*,

15(1), 55–81.

- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15, 1767–1795.
- Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, VI, 21–33.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan : Hipotesis " Trickle Down " Dikaji Ulang. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 51(3), 291–324.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Proverty. *JMPK*, 08(03), 121–129.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, Indonesia.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009, 1(2), 1–11.
- Yuliana. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 33–38.